



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

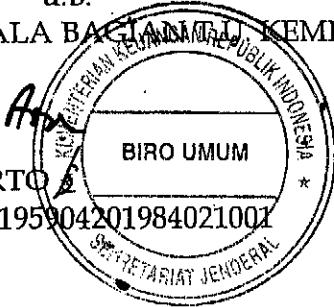
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 212/PMK.011/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA
MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI,
PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK
SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG
DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG
DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN
KEAMANAN NEGARA

DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR
KEPERLUAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
1.	Senjata Api	Senjata genggam, senjata laras panjang/bahu, senjata pinggang, beserta asesoris dan kelengkapannya
2.	Amunisi	Amunisi kaliber kecil

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM KEMENTERIAN

GIARTO
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

8.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN
KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN
BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN
KEAMANAN NEGARA

Kepada :
Kepala KPUBC/KPPBC

(kantor pabean tempat pemasukan)

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor atas barang impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Badan Narkotika Nasional sebagaimana dinyatakan berikut ini :

BADAN NARKOTIKA NASIONAL				SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP-7)						
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. B/L/AWB	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl. L/C	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. XIV PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lampiran :

- (dokumen pelengkap pabean)
- (kontrak pengadaan)

Tembusan :

- Menteri Keuangan;
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
-;
-

*Nomor : KEP- /WBC.../KP.../20...

Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. tanggal ini diberikan:

- **1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No....Tanggal
- **2) PPN dan PPhBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No Tanggal
- **3) PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No Tanggal

Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....,20.....

a.n. MENTERI KEUANGAN
Kepala KPUBC/KPPBC,

(Nama)
(NIP)

Yang Menyatakan :

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
..... (Jabatan)

.....
Nama
Pangkat

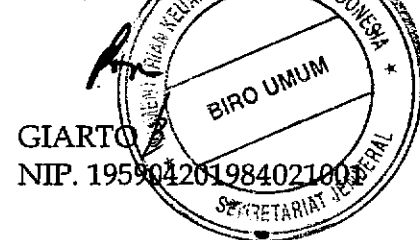
* Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC

**Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

3